

## ABSTRAK

Keseriusan pemerintah dalam membangun desa dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa untuk tahun 2017. Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi menimbulkan pendanaan internal Desa (APBD Desa). Sementara tugas asas pembantuan memberikan peluang bagi desa memperoleh sumber pendanaan dari pemerintah yang ada di atasnya (APBD, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota), Studi ini bertujuan untuk mengamati kesesuaian antara aturan dana desa dengan pelaksanaannya, serta implementasi dan dampak dan penggunaan dana desa tersebut dalam menunjang aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertumpu pada pengamatan tempat, aktor dan aktivitas yang ada di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang dipilih studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi kesesuaian antara aturan yang telah ditetapkan mengenai dana desa dan pelaksanaannya, indikasi tersebut tampak pada pelaksanaan transfer penggunaan dan pelaporan dana desa. Meskipun demikian dalam proses pencairan dana desa tidak sesuai dengan aturan karena mengalami keterlambatan. Dalam implementasinya penggunaan dana desa cukup menunjang aktivitas penggunaan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan desa, di implementasi dengan adanya perbaikan jalan sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat dana desa digunakan untuk pendirian BUMDes dan bantuan PAUD implementasi tersebut ada yang berdampak produktivitas ekonomi dan sosial.

**Kata Kunci** : Penganggaran, Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa. Metode Kualitatif

## ABSTRACT

The seriousness of the government in building the village is evidenced by the allocation of the Village Fund budget for 2017. The allocation of the Village Fund is mandated by Law No. 6 of 2014 on the village as well as Government Regulation (PP) Number 60 of 2014 on Village Funds sourced from APBN in the regulation explained that the implementation of village government embraces the principle of decentralization and co-administration. The principle of decentralization raises the internal funding of the village (APBD Desa). While the task of assistance principle provides an opportunity for the village to obtain funding sources from the existing government above (APBD, Provincial Budgets, Regency / Municipal Budgets), this study aims to observe the suitability of the village funding rules and their implementation, and the implementation and impacts and uses of the village funds in support of development activities and community empowerment research method used is qualitative research methods that rely on observation of places, actors and activities in Dese Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Jember District selected case study. The results indicate that there is an indication of conformity between the established rules of village funds and their implementation, the indications shown in the implementation of the transfer of use and reporting of village funds. Nevertheless, in the process of disbursing the village funds are not in accordance with the rules due to delay. In the implementation of the use of village funds is sufficient to support the activities of use and community empowerment. To support the development of the village, in the implementation with the improvement of the road while in the community empowerment of village funds used for the establishment of BUMDes and PAUD assistance implementation there is an impact on economic and social productivity.

Keywords: Budgeting, Allocation and Reporting of Village Funds. Qualitative Metho

